

Judul : Jembatan Batam-Bintan: hubungkan dua kwsan ekonomi
Tanggal : Senin, 03 November 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Jembatan Batam-Bintan Hubungkan Dua Kawasan Ekonomi

WAKIL Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras mendorong percepatan pembangunan Jembatan Batam-Bintan. Hal itu penting dilakukan untuk memperkuat konektivitas antarwilayah dan mendorong pertumbuhan kawasan ekonomi khusus di Kepulauan Riau (Kepri).

Andi Aras menjelaskan, keberadaan jembatan itu akan memperkuat posisi Batam sebagai salah satu pusat logistik dan perdagangan global. Pasalnya, Batam terletak di jalur pelayaran internasional, Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I.

"Pembangunan Jembatan Batam-Bintan ini sangat penting karena menghubungkan dua kawasan ekonomi khusus yang berperan vital bagi perekonomian nasional," ujar Andi Iwan dalam keterangan, Sabtu (1/11/2025).

Dia mengatakan, Batam memiliki potensi besar menjadi pusat aktivitas ekonomi dan maritim internasional karena lokasinya yang strategis di jalur perdagangan dunia. Karena itu, penguatan infrastruktur di kawasan perbatasan harus jadi prioritas Pemerintah untuk meningkatkan daya saing Indonesia terhadap negara-negara tetangga, khususnya Singapura.

"Kita harap Batam bisa berperan lebih besar di pelayaran internasional, dengan layanan logistik dan pelabuhan yang mampu bersaing dengan Singapura," tegas Legislator Fraksi Gerindra itu.

Lebih lanjut, dia menekankan, dengan wilayah yang jauh lebih luas dan potensi sumber daya yang melimpah, Indonesia seharusnya dapat meman-

faatkan keunggulan geografisnya. Indonesia, kata dia, bisa mengoptimalkan sektor transportasi laut dan perdagangan.

"Singapura wilayahnya kecil, sementara kita memiliki wilayah yang sangat besar. Potensi ini harus kita maksimalkan melalui pembangunan infrastruktur yang terintegrasi," ucapnya.

Senada, Ketua Komisi V DPR Lasarus menegaskan, percepatan realisasi proyek Jembatan Batam-Bintan akan menopang konektivitas antarwilayah. Proyek tersebut juga akan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai logistik kawasan.

Lasarus menjelaskan, salah satu hambatan utama pembangunan jembatan itu berkaitan dengan status kawasan perdagangan bebas atau free trade zone. Saat ini, status tersebut hanya berlaku penuh di Batam, sedangkan di Bintan hanya mencakup sebagian wilayah.

Perbedaan ini, lanjutnya, menimbulkan persoalan hukum dan administrasi ketika proyek jembatan mulai direncanakan secara teknis. Karena itu, perlu ada perbaikan regulasi, termasuk penyesuaian Peraturan Pemerintah, agar kedua wilayah memiliki keseragaman status hukum.

"Sehingga nantinya Batam dan Bintan memiliki status kawasan perdagangan bebas yang seragam," jelas anggota Fraksi PDIP itu.

Lasarus menegaskan, penyelesaian hambatan regulasi menjadi prasyarat penting sebelum tahapan fisik pembangunan dimulai. Komisi V DPR akan terus mendorong Pemerintah mempercepat harmonisasi kebijakan agar proyek strategis ini tidak kembali tertunda. ■ PYB